

**EVALUASI KOORDINASI DAN INTEGRASI KEBIJAKAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN OLEH BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN  
DAERAH (BAPPEDA) DI KOTA SOLOK**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana*

*Administrasi Publik (S.AP)*



**HAPPY RAHMADANI**

**NIM : 2018/18042027**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : Evaluasi Koordinasi dan Integrasi Kebijakan  
Perencanaan Pembangunan Oleh Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Di Kota Solok

**Nama** : Happy Rahmadani

**NIM / TM** : 18042027/2018

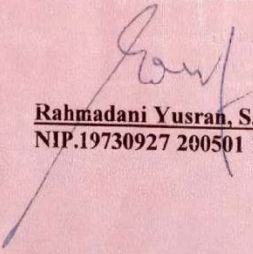
**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara

**Departemen** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Ilmu Sosial

**Padang, 16 Agustus 2022**

**Disetujui oleh  
Pembimbing,**

  
**Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si**  
**NIP.19730927 200501 1 004**

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

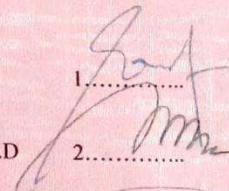
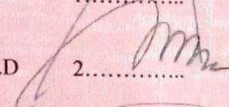
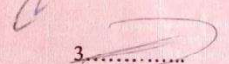
Pada hari Selasa, 16 Agustus 2022 Pukul 15:00 WIB s/d 16:00 WIB

**Evaluasi Koordinasi dan Integrasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan  
Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Di Kota Solok.**

Nama : Happy Rahmadani  
TM/NIM : 2018/18042027  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 19 Agustus 2022

**Tim Penguji :**

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Rahmadani Yusran, S.Sos.,M.Si	1. 
Anggota : Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D	2. 
Anggota : Dr. Zikri Alhadi, S.IP.,MA	3. 

**Mengesahkan  
Dekan FIS UNP**



**Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum**  
NIP. 19610218 198403 2 001

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Happy Rahmadani  
NIM/TM : 18042027/2018  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara (S1)  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Evaluasi Koordinasi dan Integrasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kota Solok”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 16 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Happy Rahmadani  
18042027/2018

## ABSTRAK

**Happy Rahmadani**  
**18042027**

**EVALUASI KOORDINASI DAN  
INTEGRASI KEBIJAKAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN OLEH  
BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)  
DI KOTA SOLOK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan integrasi kebijakan perencanaan pembangunan oleh Bappeda di Kota Solok, bagaimana pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi kebijakan Perencanaan Pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kota Solok serta dampak dari pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi kebijakan Perencanaan Pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kota Solok. Pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Kebijakan perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses dan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan tanpa terkecuali. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi kebijakan dalam perencanaan pembangunan berguna untuk menyelaraskan dan menyerasikan aktivitas-aktivitas pembangunan di daerah sehingga tercipta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan perencanaan pembangunan serta tata cara pelaksanaannya secara bersama didasarkan kepada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 serta Permendagri No. 86 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi di lapangan serta melakukan tahap reduksi data untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yang akurat dari data yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi dan integrasi kebijakan perencanaan pembangunan sudah dilaksanakan dalam bentuk penjarangan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat Kecamatan, pelaksanaan Forum SKPD, sampai dengan Musrenbang Kota Solok dalam rangka penetapan dokumen RKPD dan RAPBD Kota Solok. Akan tetapi dalam pelaksanaannya selama ini masih belum berjalan optimal, dikarenakan masih rendahnya tingkat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan, dibuktikan dengan masih terjadi disharmonisasi dan ego sektoral dari masing-masing pemangku kepentingan dalam membahas dan menyepakati dokumen perencanaan pembangunan, serta belum optimalnya peran serta masyarakat. Adapun dampak dari pelaksanaan koordinasi dan integrasi kebijakan perencanaan pembangunan oleh Bappeda di Kota Solok ini ialah terjadi inkonsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dan juga dengan dokumen anggaran yang mengakibatkan tidak efektif dan efisienya perencanaan dan penganggaran pembangunan, serta masih rendahnya usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD maupun APBD.

**Kata Kunci : Evaluasi, Koordinasi, Integrasi, Perencanaan Pembangunan**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Evaluasi Koordinasi dan Integrasi Perencanaan Pembangunan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kota Solok*. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Departemen Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing, baik ide, tenaga maupun pemikiran penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum Ph.D. Selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Dan Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Negara.
4. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Afriva Khaidir, SH. M.Hum.,MAPA. Ph.D. Selaku dosen penguji I sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP. MA. Selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang berguna bagi penyelesaian skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Departemen Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
8. Staff karyawan dan karyawan perempuan kepustakaan dan staff administrasi Departemen Ilmu Administrasi Negara dan staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Ibu Aulia Riani Syafei SE.ME. selaku Perencana Muda Sub Koordinator Perencana Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok.
10. Bapak Syamsul Kamal, SE. M.Eng. selaku Perencana Muda Sub Koordinator Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok.
11. Ibu Dirza Noveda, SE. ME selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok.
12. Bapak/Ibu lainnya yang menjadi informan dalam penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian data skripsi ini.
13. Teristimewa untuk Ibunda tercinta Ibu Kartini yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril maupun materil dan kasih sayang yang tak

terhingga, serta terima kasih untuk setiap tetesan keringat yang beliau korbankan demi menguliahkan Adinda.

14. Terima kasih kepada Abang kandung tercinta Ferry Hidayatullah yang selalu memberikan support terbaik serta semangatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan selama perkuliahan Melliana, Yulia, Lufia, Bella, Lina, Puja, Febi, Shufie, Tia, Renta, Widari, Raffi, Fikra, dan Fajar yang telah memberikan saran, masukan dan dukungan serta semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh keluarga besar Kos “Aspi Todak” Jln. Cendrawasih Gang Todak No. 15 Air Tawar Barat, Kota Padang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Seluruh keluarga besar “Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara” angkatan 2018 yang telah menjadi teman baik dan tempat saling bertukar pikiran selama 4 tahun ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, amin.



Padang, 16 Agustus 2022

Happy Rahmadani

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>15</b>
A. Kajian Teoritis.....	15
1. Konsep Kebijakan Publik.....	12
2. Konsep Evaluasi Kebijakan.....	18
3. Konsep Koordinasi Kebijakan.....	42
4. Konsep Integrasi.....	51
5. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah.....	54
B. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	62
C. Kerangka Konseptual.....	67
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>70</b>

A. Jenis Penelitian.....	70
B. Fokus Penelitian .....	70
C. Lokasi Penelitian .....	71
D. Informan Penelitian .....	71
E. Jenis dan Sumber Data .....	73
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	73
G. Uji Keabsahan Data.....	75
H. Teknik Analisis Data .....	75
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>78</b>
A. Temuan Umum .....	78
B. Temuan Khusus.....	90
C. Pembahasan .....	125
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>145</b>
A. Kesimpulan .....	145
B. Saran.....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>153</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kinerja Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kota Solok Priode tahun 2016-2020 .....	10
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian .....	72
Tabel 4.1 Luas Wilayah di Kota Solok Menurut Kecamatan dan Kelurahan .....	80
Tabel 4.2 Kondisi Kependudukan Kota Solok Tahun 2020.....	81
Tabel 4.3 PDRB-ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 .....	83
Tabel 4.5 Kinerja Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Solok Periode tahun 2016-2020 .....	117

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Perencanaan Penganggaran Tahunan.....	61
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	69
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Solok .....	79
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bappeda Kota Solok .....	89

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara.....	153
Lampiran 2. Dokumen Rujukan .....	158
Lampiran 3. Surat Pengantar Izin Penelitian Fakultas Ilmu Sosial .....	163
Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP).....	164
Lampiran 5. Pedoman Wawancara .....	165

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. selain itu perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah merubah pola kebijakan perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun perencanaan harus mampu memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta *bottom-up* dan *top-down process*. Hal ini berarti bahwa perencanaan pusat atau daerah disamping diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel juga diharapkan adanya dukungan koordinasi dan integrasi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) terutama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi ini maksudnya mampu menyatukan beberapa kewenangan

ke dalam suatu proses yang terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, dimana pencapaian tujuan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan lain atau dengan kata lain adanya kombinasi berbagai program atau kegiatan.

Dalam administrasi pemerintahan, koordinasi dimaksudkan untuk menyerasikan dan menyatukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pimpinan atau kelompok pejabat pelaksana. Suatu tindakan pelaksanaan yang terkoordinasikan berarti kegiatan para kelompok pejabat menjadi serasi, seirama dan terpadu dalam pencapaian tujuan bersama (Handayani,1998). Konsep koordinasi tersebut berlaku pula pada koordinasi pembangunan, menurut Anggara dan Sumantri (2016:224) koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, termasuk koordinasi pembangunan di daerah. Koordinasi pembangunan di daerah dilakukan baik pada tahap perencanaan pembangunan, maupun pada tahap pelaksanaan pembangunan, (Handayani, 1998). Koordinasi perencanaan pembangunan di daerah baik yang bersifat sektoral maupun regional, dilakukan oleh kepala daerah yaitu di tingkat provinsi oleh Gubernur, dan di tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Undang- Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam pasal 23 di jelaskan : “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan



pembangunan di Daerah provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebutkan sebagai Kepala BAPPEDA.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi membantu Kepala Daerah dalam bidang perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai *leading sector* pemerintah daerah bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan. Secara spesifik Bappeda merupakan unsur perencana, pengendali, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Keberhasilan suatu kegiatan dan kebijaksanaan pemerintahan daerah sangat tergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan. Untuk meringankan pekerjaan dalam pembangunan, maka diperlukan adanya koordinasi dengan instansi terkait agar mempermudah pelaksanaan pembangunan. Perencanaan itu sendiri merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan serta hal selanjutnya yang akan dilaksanakan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Salah satu aspek penting perencanaan tersebut ialah pembuatan keputusan, proses pembangunan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan. Keputusan-keputusan ini harus dibuat dengan berbagai tahapan dalam proses perencanaan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah dikenal adanya beberapa dokumen perencanaan menurut hirarki dan pentahapan tahun; pada tingkat daerah, ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk 1 tahun; sedangkan pada tingkat unit organisasi pemerintah daerah, ada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk 1 tahun. Rencana pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Dimana proses penyusunan seluruh dokumen perencanaan ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan berada dalam koridor mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dilakukan selama ini dijabarkan ke dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah.

Perencanaan ini dimulai dari tingkat Desa berupa Musrenbang Desa yang merupakan forum perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, yang bekerjasama dengan masyarakat desa, kemudian hasil usulan dari perencanaan pembangunan yang telah disepakati pada tingkat desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun anggaran yang direncanakan dan menyusun rencana 5 tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang kemudian hasil dari Rencana Kerja Pembangunan Desa tersebut diusulkan lagi pada Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan para stakeholder di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan tersebut didasarkan pada masukan dari hasil musrenbang desa serta menyepakati rencana kegiatan masing-masing desa di kecamatan yang bersangkutan. Hasil musrenbang kecamatan berupa rencana pembangunan kecamatan yang hasilnya langsung di input kedalam sebuah aplikasi yang dinamakan dengan e-planning dan SIPD.

Pada tahap Musrenbang Kota, semua aspirasi yang masuk melalui musrenbang kelurahan hingga kecamatan akan ditampung bersamaan dengan usulan kegiatan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Usulan Kecamatan akan dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis kegiatan OPD yang membidangi. Pada tahap ini OPD akan melakukan verifikasi terhadap usulan kecamatan sebelum dituangkan ke dalam daftar usulan kegiatan OPD.

Program usulan yang disetujui akan diinput kedalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Bappeda Kota Solok sebagai salah satu institusi perencanaan dan pembangunan daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk wilayah Kota Solok. Memiliki tugas yaitu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Solok dengan semua perangkat daerah yang ada di Kota Solok tanpa terkecuali. Keterlibatan tersebut dimulai sejak dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, Forum SKPD, sampai dengan Musrenbang Kota Solok yang dilaksanakan pada bulan dan tanggal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut untuk menunjang keberhasilan dan tujuan pembangunan daerah Kota Solok sesuai dengan Visi-Misi Walikota Solok terpilih Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Adapun visi-misi atau sasaran pokok pembangunan daerah kota solok ini ialah *“Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”*. Maka diperlukan sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kota Solok. Namun berdasarkan temuan penelitian pelaksanaannya selama ini masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kota Solok, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Tingkat koordinasi dan komunikasi dalam perencanaan masih rendah baik antar bidang, OPD terkait, maupun dengan *stakeholders* lainnya. Akibatnya keterpaduan program perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien menjadi sulit dicapai, Hal ini dibuktikan dengan persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan yang tidak mencapai target, dikarenakan lemahnya koordinasi dan integrasi antara agenda kerja pemerintah daerah dengan OPD serta DPRD Kota Solok dalam menyelesaikan dan menyepakati penyusunan dokumen perencanaan, (Laporan hasil capaian kinerja Bappeda Kota Solok Tahun 2010-2015).

*Kedua*, Akurasi data dan pranata perencanaan masih kurang akurat dan berkualitas. Akibatnya ketersediaan data dan akurasinya masih sangat kecil, sehingga untuk melakukan perencanaan yang berbasis data sering terkendala. Hal ini dapat dilihat dari data yang tersedia seringkali berbeda-beda walaupun berasal dari SKPD yang sama. Selain itu juga dibuktikan dengan terjadinya penurunan akurasi data perencanaan pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 dari sebelumnya 86,36 % menjadi 80% di tahun 2016. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target ketersediaan data dan keakuratan data ini adalah masih belum konsistennya perangkat daerah dalam mensupport data, (Laporan Kinerja Bappeda Kota Solok Tahun 2016).

*Ketiga*, Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen anggaran masih belum optimal. Akibatnya terjadi ketidakselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) dengan dokumen anggaran

penganggaran (APBD). Fenomena ini disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Bappenas, Rita Erawati, SH, LLM dalam kegiatan FGD yang diselenggarakan di Kota Solok terkait permasalahan regulasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah, diantaranya belum adanya kesatuan yang sistematis terkait tata cara pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penganggaran. Sementara itu, jika dilihat dari aspek legal culture, masih terdapat ego kelembagaan dan lemahnya koordinasi internal lembaga pemerintah yang mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya perencanaan dan penganggaran pembangunan, (Erawati,2019).

*Keempat*, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal. Akibatnya rendahnya tingkat usulan masyarakat yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan dan APBD, sehingga kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi tidak optimal. Padahal Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipatif masyarakat terdapat pada 4 (empat) pasal Undang-Undang ini yaitu pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Sistem perencanaan yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas), yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif. Mekanisme *top-down* dilakukan dengan proses teknokratik, yaitu penyusunan rancangan awal, evaluasi pelaksanaan

kegiatan tahun sebelumnya serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Sedangkan proses *bottom-up* dilaksanakan melalui penjangkauan aspirasi masyarakat pada musrenbang.

Rendahnya tingkat usulan masyarakat yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan dan APBD ini diakibatkan oleh beberapa kendala. 1). Kendala pada rendahnya tingkat usulan masyarakat yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan.. Hal ini dikarenakan beberapa usulan belum bisa ditampung karena keterbatasan anggaran sehingga perlu dilihat lagi skala prioritas dan manfaatnya kepada masyarakat, selanjutnya usulan masyarakat terutama pada bidang fisik dalam terkendala pada status lahan yang akan digunakan untuk pembangunan. 2). Kendala rendahnya tingkat usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD. Hal ini dikarenakan terdapat usulan masyarakat yang dialihkan pendanaanya pada APBD provinsi dan APBN. Permasalahan lainnya usulan belum bisa ditampung karena terkendala anggaran sehingga perlu dilihat skala prioritas dan manfaatnya kepada masyarakat (Laporan Kinerja Kota Solok Tahun 2016).

Kendala-kendala diatas lebih rincinya dijabarkan dalam Kinerja Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Solok Periode tahun 2016-2020 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

Kinerja Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Solok Periode tahun  
2016-2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	84,72	76,38	74,96	82,74	88,53
2	Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan tahunan	73,55	114,01	101,87	100,04	100
3	Tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD	77,01	81,53	81,52	100,92	77,56

Sumber: Bappeda Kota Solok, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2016 s/d 2020 capaian masing-masing indikator kinerja berfluktuasi. Untuk Capaian indikator tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD pada tahun 2019 sebesar 82.74% meningkat menjadi 88.53% pada tahun 2020. Artinya, usulan masyarakat yang tertampung dalam musrenbang, meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Banyaknya usulan masyarakat dalam musrenbang yang tidak sebanding dengan kemampuan daerah dalam menampung usulan tersebut, menyebabkan masih banyak usulan masyarakat yang masih belum bisa ditampung. Pada dasarnya jumlah usulan masyarakat yang terakomodir, juga dipengaruhi oleh Prioritas Pembangunan Tahunan serta kesesuaian dengan keselarasan usulan terhadap program dan kegiatan.

Bencana non-alam berupa wabah covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 sampai saat ini, menyebabkan banyak kegiatan yang tidak dapat



terlaksana. Sehingga berpengaruh terhadap capaian target kinerja pembangunan daerah, termasuk terhadap capaian target sasaran strategis RPJMD yang turun pada tahun 2020 menjadi 77.56%.

Berdasarkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda diatas dapat terlihat terjadi penurunan atau pelemahan unsur-unsur yang menjadi indikator koordinasi perencanaan pembangunan yang belum berjalan dengan maksimal, seperti rendahnya tingkat komunikasi dalam berkoordinasi, kurangnya tingkat kesadaran para implementor, koordinator dan pelaksana dalam perencanaan. Hal tersebut merupakan fenomena yang menyebabkan koordinasi perencanaan pembangunan sering mengalami kendala yang ditemukan di lapangan. Lemahnya koordinasi perencanaan menyebabkan rendahnya kemampuan pemerintah melaksanakan program dan kegiatan pembangunan (Abbas,2020).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Evaluasi Koordinasi dan Integrasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kota Solok.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat koordinasi dan komunikasi dalam perencanaan masih rendah baik antar bidang, SKPD maupun dengan stakeholder lainnya.

2. Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran masih belum optimal
3. Akurasi data dan pranata perencanaan masih kurang akurat dan berkualitas yang menyebabkan ketersediaan data dan akurasinya masih sangat kecil, sehingga untuk melakukan perencanaan yang berbasis data sering terkendala.
4. Masih terdapat ego kelembagaan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun perencanaan pembangunan.
5. Lemahnya koordinasi internal lembaga pemerintah.
6. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal.

#### **C. Pembatasan Masalah**

Sesuai dengan identifikasi permasalahan diatas, maka pembahasan dalam penelitian dibatasi pada beberapa permasalahan penelitian. Pembatasan ini, bertujuan agar pembahasan penelitian dilakukan secara terfokus dan mendalam, yaitu; Pertama, masih rendahnya tingkat koordinasi dalam perencanaan antar bidang, SKPD maupun dengan Stakeholder lainnya. Kedua, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang belum optimal. Ketiga, Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran masih belum optimal.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi kebijakan Perencanaan Pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kota Solok?
2. Apa dampak Koordinasi dan Integrasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kota Solok?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dilihat dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pelaksanaan koordinasi dan integrasi kebijakan Perencanaan Pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kota Solok.
2. Menganalisis Dampak dari koordinasi dan integrasi kebijakan Perencanaan Pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kota Solok.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat ditarik manfaat penelitian sebagai berikut :

- 1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan keilmuan administrasi negara khususnya dalam mata kuliah kebijakan publik, dan perencanaan pembangunan.

## 2) Secara Praktis

- a. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Bappeda Kota Solok dalam melakukan koordinasi dan integrasi kebijakan dalam menyusun perencanaan pembangunan agar lebih efektif dan efisien.
- b. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama.